

MIGRASI PASCA-PERANG DUNIA II DAN MULTIKULTURALISME DI AUSTRALIA

Irsyaad Suharyadi¹ Najwa Aziza Nahida²

^{1,2}Hubungan Internasional, Universitas Lampung

Email: irsyadsuharyadi@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of post-World War II migration and cultural globalization in shaping Australia's national and regional identity. The end of World War II marked a critical turning point in Australia's demographic and policy orientation, particularly through the expansion of immigration programs and the gradual dismantling of the White Australia Policy. Drawing upon a qualitative descriptive approach with a historical-analytical method, this research analyzes secondary data from academic literature, policy documents, and international reports to explore the interplay between migration flows, global cultural exchanges, and identity construction. The findings reveal that large-scale migration not only transformed Australia's demographic composition but also facilitated the emergence of multiculturalism as a defining feature of its national identity. Through processes of cultural interaction, adaptation, and hybridization, migrants contributed to the formation of new social practices and urban cultural landscapes. However, the study also highlights that the construction of a multicultural identity is neither linear nor uncontested. Persistent challenges such as racism, social exclusion, and unequal integration continue to shape the limits of multiculturalism in Australia. From a constructivist perspective in International Relations, this study argues that identity is socially constructed through historical processes, policy frameworks, and transnational interactions. Australia's evolving identity reflects not only domestic transformations but also its repositioning within the Indo-Pacific region and the broader global order. By linking migration, globalization, and identity, this study contributes to a deeper understanding of how states negotiate internal diversity while projecting their identity externally in international relations.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran migrasi pasca-Perang Dunia II dan globalisasi budaya dalam membentuk identitas nasional dan regional Australia. Berakhirnya Perang Dunia II menandai titik balik kritis dalam orientasi demografis dan kebijakan Australia, terutama melalui perluasan program imigrasi dan penghapusan bertahap Kebijakan Australia Putih. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode historis-analitis, penelitian ini menganalisis data sekunder dari literatur akademis, dokumen kebijakan, dan laporan internasional untuk mengeksplorasi interaksi antara arus migrasi, pertukaran budaya global, dan konstruksi identitas. Temuan menunjukkan bahwa migrasi berskala besar tidak hanya mengubah komposisi demografis Australia tetapi juga memfasilitasi munculnya multikulturalisme sebagai ciri khas identitas nasionalnya. Melalui proses interaksi budaya, adaptasi, dan hibridisasi, para migran berkontribusi pada pembentukan praktik sosial baru dan lanskap budaya perkotaan. Namun, studi ini juga menyoroti bahwa konstruksi identitas multikultural bukanlah proses yang linier maupun tanpa kontroversi. Tantangan yang terus berlanjut seperti rasisme, eksklusi sosial, dan integrasi yang tidak setara terus membentuk batasan-batasan multikulturalisme di Australia. Dari perspektif konstruktivis dalam Hubungan Internasional, studi ini berargumen bahwa identitas dibangun secara sosial melalui proses historis, kerangka kebijakan, dan interaksi transnasional. Identitas Australia yang terus berkembang tidak hanya mencerminkan transformasi domestik, tetapi juga reposisinya di kawasan Indo-Pasifik dan tatanan global yang lebih luas. Dengan mengaitkan migrasi, globalisasi, dan identitas, studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara-negara menegosiasikan keragaman internal sambil memproyeksikan identitas mereka secara eksternal dalam hubungan internasional.

PENDAHULUAN

Salah satu titik balik penting dalam transformasi sosial dan politik Australia ialah peristiwa setelah berakhirnya Perang Dunia II, salah satunya lewat berbagai alur proses migrasi besar-besaran serta terjadinya percepatan globalisasi budaya. Karena Australia bagian dari kawasan Oseania, terjadi perubahan identitas nasional dan regional yang dimulai dari tahun 1945 di negara ini (Mence, 2017). Dimulai dari didirikannya Departemen Imigrasi secara resmi pada 13 Juli 1945 — dengan menjadikan Arthur Calwell sebagai menteri pertama. Kemudian, pada tahun 1948, terciptalah Undang- Undang Kewarganegaraan yang menciptakan status ‘warga negara Australia. Pada tahun 1949, departemen ini mengiklankan betapa pentingnya imigrasi dalam meningkatkan populasi. Setelah melewati berbagai revisi syarat dalam mendapatkan kewarganegaraan Australia (dengan salah satunya menghapus teks dikte), pada tahun 1959, populasi Australia mencapai angka 10 juta. Dengan mendukung memuncaknya angka populasi, Australia pun mulai melonggarkan perbatasan imigrasi terhadap warga non-Eropa pada tahun 1963-1966. Tidak berhenti sampai disitu, kebijakan White Australia Policy dibongkar secara bertahap pada tahun 1970-an serta adanya program Populate or Perish (Mence, 2017). Dengan hal ini komposisi demografis Australia ini dipengaruhi oleh masuknya arus migrasi serta membuka jalur budaya yang semakin intens dalam kancah global.

Jika melihat dalam Kajian Hubungan Internasional dalam sudut pandang konstruktivisme, dinamika ini memperlihatkan keterkaitan dari migrasi, identitas, dan globalisasi budaya memang penting. Keterkaitan inilah yang meletakkan posisi Australia di kawasan Indo-Pasifik dengan pembentukan perilaku negara dan diplomasi yang dibuat. Dengan demikian, kajian ini membuka ruang analisis dengan melihat hubungan antara dinamika sejarah kawasan dan proses konstruksi identitas lewat perspektif konstruktivisme. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Alexander Wendt yang dimana ia mengatakan bahwa setiap interaksi antar negara dipengaruhi oleh ego dan perubahan yang terjadi dalam diri mereka sendiri; konstruktivisme juga diciptakan untuk memahami realitas tatanan internasional lewat semiotika sosial, pembangunan naratif, sejarah manusia, fenomenologi, dan dramaturgi (Kumar, 2025).

Artikel ini mengkaji bagaimana imigrasi pasca Perang Dunia II dan globalisasi budaya telah mempengaruhi identitas wilayah Australia, baik dalam konteks domestik maupun

dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dengan pendekatan historis, makalah ini melacak evolusi kebijakan imigrasi, pergeseran identitas nasional, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap posisi internasional Australia. Analisis ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana proses historis telah membentuk identitas regional, dan bagaimana identitas tersebut, pada gilirannya, telah mempengaruhi dinamika hubungan internasional sepanjang abad ke-20 dan ke-21.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan migrasi Australia pasca Perang Dunia II berkembang dan mempengaruhi perubahan struktur sosial masyarakat?
2. Bagaimana migrasi internasional dan globalisasi budaya berkontribusi dalam pembentukan identitas Australia sebagai negara multikultural dalam perspektif konstruktivisme?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan kebijakan migrasi Australia pasca Perang Dunia II serta dampaknya terhadap dinamika sosial masyarakat domestik.
2. Mengkaji peran migrasi internasional dan globalisasi budaya dalam membentuk identitas Australia sebagai negara multikultural melalui perspektif konstruktivisme dalam Hubungan Internasional.

Definsi Konsep

Kajian mengenai keterkaitan hubungan migrasi, globalisasi budaya, dan pembentukan identitas Kawasan Australia ini telah dikembangkan oleh berbagai ahli sejarah dan teori hubungan internasional. Pertama, literatur mengenai sejarah migrasi Australia yang menekankan perubahan demografis pascaperang sebagai fondasi penting dalam rekonfigurasi identitas nasional. Hal ini terdapat dalam buku "From White Australia To Woomera" karya dari James Jupp (2007). Dalam bukunya, Jupp (2007) menuliskan mengenai berbagai perubahan kebijakan migrasi dari sistem diskriminatif White Australia menuju multikultural dengan menyisipkan keberagaman dalam identitas resmi negara. Dalam mencapai negara yang dicap sebagai "paling multikultural", negara Australia, Jupp (2007)

mengasumsikan bahwa kebijakan imigrasi yang ditetapkan oleh Australia memiliki tiga aspek: seleksi dan control asupan; layanan dan dukungan bagi mereka yang telah menetap; dan kebijakan yang dirancang untuk mengelola konsekuensi dari penciptaan masyarakat multikultural melalui imigrasi. Semua hal ini telah melewati berbagai waktu — hal ini menjadi tanggung jawab Departemen Imigrasi Persemakmuran (Jupp, 2007).

Kedua, globalisasi budaya dipahami lewat konsep pertukaran lintas batas dan menjadi fenomena historis dan politis yang semakin intens setelah tahun 1945. Hal ini terdapat dalam buku “Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization” karya dari Arjun Appadurai (1996). Dalam bukunya, Appadurai (1996) menuliskan bahwa globalisasi budaya dapat terjadi dikarenakan disatukan oleh 5 aliran: manusia (ethnoscapes); media (mediascapes); teknologi (technoscapes); finansial (financescapes); dan ide (ideoscapes). Kelima aliran ini saling berinteraksi satu sama lain dan saling tabrakan juga (Appadurai, 1996). Kelima aliran inilah yang membuat bagaimana seorang aktor dapat melihat dunia — tergantung dari posisi individu dalam berbagai arus yang telah dibuat oleh kelima aliran ini. Semua aktor — dari negara sampai individu — memiliki cara pandang masing-masing dalam melihat dan bermain pada lanskap global ini. Konsep ini dapat dikatakan relevan dalam menganalisis dalam penerimaan, penolakan, atau negosiasi yang dilakukan oleh negara Australia dalam menyatukan unsur-unsur budaya global untuk membentuk identitas negaranya ini.

Ketiga, literatur kajian dalam Hubungan Internasional (HI), dalam hal ini menggunakan perspektif konstruktivisme dalam membentuk kepentingan dan perilaku negara dengan menekankan peran identitas. Hal ini terdapat dalam buku “Social Theory of International Politics” karya dari Alexander Wendt (1999). Dalam bukunya, Wendt (1999) menulis bahwa perilaku negara masuk ke dalam konteks karakter negara, karena setiap negara memiliki keunikannya sendiri: nilai-nilai; sejarah; institusi; sistem politik; lanskap sosial; sistem ekonomi; dan praktik keagamaan. Unsur-unsur ini memengaruhi bagaimana negara bertindak dalam sistem internasional melalui kebijakan luar negerinya (Wendt, 1999). Tidak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa identitas sebuah negara itu bukan entitas yang sifatnya statis, melainkan akan melewati berbagai konstruksi sosial yang suatu saat dapat berubah melalui interaksi dan dinamika historis.

Keempat, kajian sejarah Kawasan Oseania yang akan menambah pemahaman mengenai hubungan antara Australia dengan lingkungannya. Hal ini terdapat dalam buku "Decolonisation and the Pacific: Indigenous Globalisation and the Ends of Empire" karya dari Tracey Banivanua Mar (2016). Dalam bukunya, Mar (2016) menulis bahwa identitas yang menempel dalam negara Australia ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai sejarah kolonial serta relasi yang terjalin dengan komunitas Pasifik. Hal ini dijabarkan olehnya bahwa pada akhir abad ke-19, sebagian pulau di Pasifik dibagi-bagi, dipindahkan, dan diperdagangkan oleh kekuatan Eropa dalam proses yang menggabungkan samudra dan rakyatnya ke dinamika global kekaisaran dan pembentukan bangsa (Banivanua-Mar, 2016). Pasifik dibiarkan menjadi koloni. Terkhusus untuk koloni pemukim, Mar (2016) menjabarkan bahwa masyarakat adat dibersihkan dari tanah mereka dan dibatasi di pinggiran.

Dengan menggabungkan literatur sejarah migrasi, teori globalisasi budaya, perspektif konstruktivisme dalam kajian HI, dan studi kawasan Oseania, artikel ini menyajikan kerangka analitis komprehensif untuk memahami proses pembentukan identitas di Australia pasca-perang. Silang pendapat dari empat bidang literatur ini memungkinkan evaluasi yang lebih terstruktur tentang bagaimana migrasi dan arus budaya global menentukan identitas suatu wilayah sekaligus memengaruhi posisinya dalam hubungan internasional kontemporer.

Hipotesis Penelitian

Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa migrasi pasca Perang Dunia II dan arus globalisasi budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan identitas nasional Australia. Perubahan kebijakan imigrasi, termasuk penghapusan White Australia Policy dan perluasan program migrasi terampil, diduga menjadi faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang semakin multikultural. Selain itu, interaksi antara berbagai kelompok migran dengan masyarakat lokal melalui praktik sosial, budaya, dan ekonomi diyakini menghasilkan bentuk-bentuk identitas hibrida yang mencerminkan dinamika globalisasi budaya. Namun demikian, proses ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan, karena masih terdapat faktor-faktor seperti rasisme, diskriminasi, dan eksklusi sosial yang membatasi integrasi penuh dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa identitas Australia sebagai negara multikultural merupakan hasil

konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan negara, arus migrasi global, dan dinamika sosial domestik dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melakukan analisis mengenai proses terjadinya migrasi internasional dan arus budaya global setelah Perang Dunia II membentuk identitas Kawasan Australia. Alan Bryman menyatakan bahwa istilah 'penelitian kualitatif' digunakan untuk merujuk pada pendekatan penelitian sosial di mana isu- isu yang kompleks tidak dapat diatasi hanya dengan menggunakan data kuantitatif (Bryman, 2016). Banyak penulis yang mengkaji penelitian kualitatif menunjukkan kekritisan terhadap pandangan semacam itu, karena esensi utama dari penelitian kualitatif tidak hanya terbatas pada absennya data numerik. Lebih dari itu, pendekatan kualitatif mengadopsi metode induktif dalam penyelesaian masalah, yang berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang cenderung beraspek inferensial.

Menurut Bryman, Langkah-langkah yang akan diterapkan dalam pendekatan kualitatif untuk penelitian ini meliputi (Bryman, 2016):

1. Merumuskan masalah secara umum,
2. Memilih situs dan subjek yang relevan,
3. Mengumpulkan data yang relevan,
4. Menafsirkan data,
5. Mengembangkan kerangka konseptual dan teori yang relevan, dengan: menyesuaikan rumusan masalah; melakukan pengumpulan data tambahan, menafsirkan data, dan
6. Menyajikan temuan dan kesimpulan.

Melalui langkah-langkah ini, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sumber data sekunder menjadi data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Alan Bryman, terdapat klasifikasi dokumen dalam beberapa jenis yang di mana dokumen resmi dari pemerintah, dokumen resmi dari organisasi, laporan, publikasi, jurnal, dan sumber-sumber daring terpercaya yang termasuk ke dalam studi

dokumen yang sah dijadikan sebagai data sekunder (Bryman, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku akademik terkait sejarah Australia, migrasi global, dan cultural studies; artikel jurnal 10 tahun terakhir mengenai identitas Australia dan multikulturalisme; dan analisis laporan internasional mengenai migrasi dan budaya global.

Penelitian ini akan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran buku dan artikel akademik lewat website seperti JSTOR, Google Scholar, Taylor & Francis, dan SAGE; mengumpulkan dokumen sejarah dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia mengenai imigrasi pasca- Perang Dunia II; dan rekognisis literatur teoritis yang berkaitan dengan identitas, global cultural flows, dan konstruktivisme dalam kajian HI. Teknik analisis reduksi daya, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang didapat menjadi teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan cara melakukan seleksi data yang memiliki keterkaitan dengan migrasi globalisasi budaya dan identitas Australia serta melakukan perumusan bagaimana jalur budaya global menyumbang kontribusi dalam bertransformasinya identitas Australia sebagai kawasan multikultural.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Kebijakan Migrasi Sebagai Katalisator Jalur Budaya Global

Rekonstruksi sejarah menunjukkan bahwa program imigrasi pasca Perang Dunia II (*assisted migration*) memperluas basis populasi Australia dari inti Anglo-Saxon dan Celtic menjadi keragaman etnis yang meluas ke seluruh Eropa dan kemudian ke Asia serta kawasan Pasifik. Perubahan politik pada dekade 1960-an dan 1970-an (pembubaran diskriminasi rasial resmi) memfasilitasi kedatangan imigran yang membawa praktik budaya baru (bahasa, budaya makanan, ritual keagamaan). Perubahan ini tidak hanya memperkaya populasi tetapi juga membuka jalur budaya yang menghubungkan Australia dengan jaringan global (transfer budaya, media diaspora, film, musik) dan kawasan Asia-Pasifik (Jupp, 2007). Pada dasarnya, kebijakan imigrasi berfungsi sebagai infrastruktur institusional yang memfasilitasi globalisasi budaya di tingkat regional.

Jika kita lihat dalam konteks Sejarah perubahan kebijakan, Kebijakan imigrasi Australia telah mengalami perubahan signifikan pasca-Perang Dunia II dalam mengalihkan

fokus pada migrasi Eropa yang masuk ke dalam wilayah Australia. Holt yang pada saat itu memegang pemerintahan mengabaikan kebijakan White Australia pada tahun 1966 (Rickard, 2017). Hal ini menandai perubahan dalam menerima migran dengan lebih beragam. Evolusi kebijakan ini mengakibatkan meningkatnya migrasi dari sumber-sumber non-tradisional, terutama dari wilayah Asia, yang telah membentuk kembali karakter multikultural (Jupp, 2007; Rickard, 2017).

Negara-negara Asia semakin menjadi sumber utama migran permanen yang masuk ke dalam kawasan Australia. Jika dilihat datanya pada tahun 2017-2018, Asia menyumbang sebesar 64% migran permanen, dengan India dan China yang menjadi kontributor terbesar (Aly et al., 2020). Aly dkk (2020) mengatakan bahwa semasa pemerintahan Howard memimpin, Australia menanggapi permasalahan mengenai imigrasi ini menjadi suatu hal yang serius — dengan memperluas dan memprioritaskan kategori migrasi terampil. Kebijakan ini menyebabkan peningkatan substansial dalam migran terampil, dengan pemasukan migran sebesar tiga kali lipat antara tahun 1996 dan 2006, dan berlipat ganda lagi pada tahun 2013 (Aly et al.,2020).

Aly dkk (2020) melanjutkan bahwa migran terampil ini, terutama dari wilayah Asia, memiliki partisipasi tempat kerja yang tinggi, pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata, dan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi Australia. Fokus ekonomi pada migrasi terampil dari berbagai latar belakang secara tidak sengaja memupuk jalur budaya baru. Dengan hal ini, pemerintah Australia memperkenalkan dan memperluas program migrasi sementara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan bisnis. Program-program ini melihat peningkatan yang signifikan dalam visa baru, dengan menekankan visa pelajar dan visa liburan kerja dengan menjadi kategori terbesar. Banyak dari visa sementara ini menawarkan jalur ke tempat tinggal permanen, yang selanjutnya mengintegrasikan beragam populasi ke dalam masyarakat Australia (Aly et al.,2020).

2. Praktik Budaya Urban dan Hibriditas Identitas

Australia digambarkan sebagai negara dengan profil keragaman etnis yang setara dengan negara Amerika Serikat dan Kanada, dan memiliki intake imigran terbesar secara relatif di antara negara-negara pemukim (Collins, 2008; Rickard, 2017). Collins (2008) mengatakan bahwa Imigran di Australia saat ini sangat beragam, datang dari seluruh

penjuru dunia dengan “diverse religious affiliations and cultural practices and network”. Jika dilihat pada tahun 2001, sekitar 83% individu kelahiran luar negeri di Australia tinggal di kota-kota besar, dibandingkan dengan sekitar 61% populasi kelahiran Australia itu sendiri; dengan menjadikan kota Sydney dan Melbourne sebagai tujuan utama para imigran. Konsentrasi imigran di kota-kota besar ini secara inheren menciptakan dan memelihara budaya urban yang beragam (Collins, 2008).

Collins (2008) menambahkan bahwa migran menciptakan ruang-ruang budaya di dalam kota: pasar makanan, festival etnis, media komunitas, masjid/gereja/kuil, dan pusat komunitas yang menunjukkan stratifikasi budaya. Praktik-praktik ini tidak hanya melestarikan unsur-unsur budaya asal, tetapi juga berinteraksi dengan budaya Australia dan menghasilkan praktik-praktik hibrida. Contohnya adalah adaptasi kuliner, bahasa campuran, dan identitas generasi kedua yang menggabungkan simbol-simbol lokal dan transnasional. Proses ini menegaskan bahwa identitas lokal bersifat dinamis dan dibangun tidak hanya melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari.

3. Batas-Batas Integrasi Dalam Rasisme

Meski banyak bukti integrasi budaya, hasil penelitian juga menunjukkan berbagai eksklusi. Berbagai konflik yang terjadi dalam membentuk identitas multikulturalisme untuk Australia ini memperlihatkan bahwa proses yang dilewati proses yang “bertarung”, di mana ingatan dan narasi publik bisa menyingkirkan pengalaman tertentu, sehingga pembacaan identitas menjadi selektif. Dalam hal ini, peneliti Batasan integrasi sosial imigran di wilayah Australia, dengan menyoroti peran rasisme, diskriminasi, dan dinamika sosio-politik yang memengaruhi kehidupan sehari-hari pendatang baru. Temuan utama menunjukkan bahwa rasisme dan segala bentuk diskriminasi, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, merupakan hambatan signifikan dalam pembentukan hubungan sosial yang bermakna antara imigran dan penduduk lokal.

Alexander, dkk (2025) menemukan berbagai temuannya. Pertama, pengalaman eksklusi melalui othering muncul sebagai kendala utama dalam pembentukan persahabatan. Migran kerap menghadapi konservatisme lokal yang menciptakan ruang sosial di mana rasisme dapat tumbuh. Hal ini tercermin, misalnya, dalam interpretasi hasil referendum Indigenous Voice to Parliament sebagai indikator mentalitas rasis di beberapa wilayah

regional, terlepas dari keramahan individual yang ditunjukkan oleh penduduk setempat. Selain itu, diskriminasi yang dialami imigran, terutama mereka yang secara terbuka mengekspresikan identitas budaya atau agama mereka, seperti wanita yang mengenakan jilbab, memiliki dampak langsung pada rasa penerimaan dan keamanan sosial mereka. Meskipun banyak penduduk lokal bersikap ramah dalam interaksi sehari-hari, keramahan ini tidak selalu terjelmakan menjadi hubungan yang lebih dalam. Akibatnya, atmosfer sosial yang tampaknya inklusif seringkali terbukti tidak cukup untuk membangun persahabatan yang lebih bermakna.

Tidak berhenti sampai disitu, penelitian ini menyoroti adanya prasangka rasial dan etnis di kalangan sebagian penduduk lokal. Meskipun tidak universal, kecenderungan ini menciptakan batas-batas tak terlihat yang menghalangi integrasi sosial yang penuh. Hambatan-hambatan ini menyebabkan kesepian, alienasi, dan kurangnya rasa memiliki di kalangan imigran. Situasi ini menunjukkan bahwa integrasi ditentukan tidak hanya oleh ketiadaan permusuhan, tetapi juga oleh adanya hubungan sosial yang bermakna (Alexander et al., 2025). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alexander, dkk (2025) secara konseptual membedakan antara keramahan dan persahabatan. Keramahan yang ditunjukkan oleh penduduk lokal seringkali bersifat permukaan dan tidak cukup untuk membangun kedekatan emosional atau solidaritas sosial. Ketidakcocokan antara keramahan permukaan dan ketidakhadiran hubungan yang mendalam merupakan indikator utama sifat terbatas integrasi sosial di dalam komunitas lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hasil interaksi kompleks yang melibatkan kebijakan migrasi, arus globalisasi budaya, beragam berbagai dinamika sosial-politik domestik, dan pembangunan ulang identitas negara ini sangat mempengaruhi Australia dalam melakukan transformasi identitas Australia setelah Perang Dunia II berakhir. Dimulai dari dilepasnya kebijakan White Australia, membuka kesempatan untuk migran non-Eropa untuk masuk ke wilayah Australia, serta pemerintah Australia yang banyak mengembangkan berbagai program migrasi terampil ini seakan-akan mempersilahkan berbagai budaya dari berbagai tempat untuk masuk; Australia dengan senang hati menyatu dengan hal itu dan membentuknya menjadi bagian identitas

sebagai negara multikultural. Tentu saja, masuknya berbagai budaya ini memunculkan berbagai interaksi yang melahirkan identitas baru yang menunjukkan bahwa Masyarakat Australia menunjukkan sifat dinamisnya. Akan tetapi, tentu saja integrasi sosial ini menemukan berbagai hambatan, salah satu faktor terbesarnya ialah rasisme yang menciptakan ketegangan dalam berbagai aspek — salah satunya ialah dalam pembuatan kebijakan multikultural nasional serta memunculkan berbagai prasangka yang membuat batas-batas dalam penerimaan sosial itu ada. Maka dari itu, Australia harus mencari solusi dalam menghadapi tantangan sekaligus mencari jawaban absolut dalam mempertahankan identitas multikultural demi memperkuat posisinya dalam hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, B., Rivera, L., & Wickes, R. (2025). Friendly, not friends: Migrant settlement and diverse social ties in Australian regional cities. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 51(1), 122–140. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2393652>
- Aly, A., Barnett, C., Fozdar, F., Gallop, G., J. Maginn, P., Nahan, M., Piestch, J., Reilly, B., Saggar, S., Yasmeen, S., & Zhang, E. (2020). *Re-imagining Australia: Migration, culture, diversity* (S.Saggar & A. Zens, Eds.). UWA Public Policy Institute.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Banivanua-Mar, T. (2016). *Decolonisation and the Pacific: Indigenous globalisation and the ends of empire*. Cambridge University Press.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods (Fifth Edition)*. Oxford University Press.
- Collins, J. (2008). Globalisation, immigration and the second long post-war boom in Australia. *Journal Of Australian Political Economy*. https://www.researchgate.net/publication/297808489_Globalisation_immigration_and_the_second_long_post-war_boom_in_Australia
- Jupp, J. (2007). *From white Australia to Woomera: The story of Australian immigration (Second edition)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511720222>
- Kumar, P. (2025). CONSTRUCTING THE INTERNATIONAL RELATIONS THROUGH IDENTITY. *UGC Care Journal*, 382–396.
- Mence, V. (2017). *A History of the Department of Immigration: Managing migration to Australia* (S. Gangell & R. Tebb, Eds.; Revised edition June 2017.). <https://nla.gov.au/nla.obj-2815661151>, <http://handle.slv.vic.gov.au/10381/405081>, <http://digital.slv.vic.gov.au/webclient/DeliveryManager?pid=4869281>, <https://nla.gov.au/nla.obj-2815661151-t>
- Rickard, J. (2017). *Australia: A Cultural History*. Monash University Publishing.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.

